



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2020 ;
- b. bahwa dalam rangka Perubahan RKPD Tahun 2021 dan memperhatikan aspirasi, usulan masyarakat dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sambas Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten sambas Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 43



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SAMBAS NOMOR 39
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2021

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021

No	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas
2	Dinas Kesehatan Kab. Sambas
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sambas
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sambas
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sambas
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas
9	Dinas Perhubungan Kab. Sambas
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Sambas
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas
15	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas
17	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sambas
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kab. Sambas

No	PERANGKAT DAERAH
20	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Sekretariat Daerah Kab. Sambas
23	Sekretariat DPRD Kab. Sambas
24	Inspektorat Daerah Kab. Sambas
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sambas
26	Kecamatan Selakau
27	Kecamatan Pemangkat
28	Kecamatan Jawai
29	Kecamatan Tebas
30	Kecamatan Sambas
31	Kecamatan Sejangkung
32	Kecamatan Teluk Keramat
33	Kecamatan Paloh
34	Kecamatan Sajingan Besar
35	Kecamatan Galing
36	Kecamatan Subah
37	Kecamatan Tekarang
38	Kecamatan Semparuk
39	Kecamatan Sebawi
40	Kecamatan Sajad
41	Kecamatan Jawai Selatan
42	Kecamatan Tangaran
43	Kecamatan Selakau Timur
44	Kecamatan Salatiga

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
REPLIKA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pemula Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
2021**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	27
2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021	36
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	49
4.2. Rencana Tindaklanjut	50

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sambas s/d Triwulan II Tahun 2021 9
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD 2021 22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 23
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 BAPPEDA Kabupaten Sambas 28
Tabel 2.5	Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sambas 35
Tabel 3.1	Rekapitulasi Daftar Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Renja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA perangkat daerah.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021, hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun

2021. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sambas yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sambas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

- 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 96);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Sambas disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021.

b. Tujuan

Dokumen Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Sambas disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sambas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD;
- 2.5. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kabupaten Sambas Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2021. Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Bappeda Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 5 program dengan 18 kegiatan, 56 sub kegiatan dengan anggaran Belanja Langsung Rp. 7.918.063.052,00 dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp.2.882.142.974,00 atau 36,40%. Pencapaian realisasi anggaran Triwulan II relatif rendah dikarenakan adanya

penyempurnaan anggaran sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilakukan sesuai rencana, disamping itu ada beberapa kegiatan yang dipihak ketigakan masih dalam proses pelaksanaan, antara lain kegiatan Penyusunan RPJMD, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kabupaten Sambas sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Bappeda Kabupaten Sambas s/d Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2021 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)		Unit perangkat at daerah Penang gung Jawab								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/100		15								
1	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	60	bulan	2.829.260.534,00	48	bulan	1.870.535.521,00	12	bulan	432.048.598,00	3	bulan	27.212.822,00	3	bulan	59.959.157,00	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	87.171.979,00	54	1.957.707.500,00	90	69,20	Litbang
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Keanekaragaman hayati	60	bulan	2.829.260.534,00	48	bulan	1.870.535.521,00	12	bulan	432.048.598,00	3	bulan	27.212.822,00	3	bulan	59.959.157,00	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	87.171.979,00	54	1.957.707.500,00	90	69,20	
		Pengelolaan Kebun Raya	Operasional, Sarpras dan pemeliharaan Kebun Raya Sambas	60	bulan	2.829.260.534,00	48	bulan	1.870.535.521,00	12	bulan	432.048.598,00	3	bulan	27.212.822,00	3	bulan	59.959.157,00	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	87.171.979,00	54	1.957.707.500,00	90	69,20	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	%	12.944.958.749,54	48	Bulan	6.153.495.906,20	12	Bulan	4.621.515.778,00	3	bulan	761.983.017,00	3	bulan	1.260.106.581,00	0	bulan	0,00	0	bulan	0,00	6	bulan	2.022.089.598,00	54	8.175.585.504,20	54	63,16	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60	bulan	104.500.000,00	48	bulan	37.948.354,00	12	bulan	10.714.661,00	3	bulan	0,00	3	bulan	5.155.874,00	0	bulan	0,00	0	bulan	0,00	6	bulan	5.155.874,00	54	43.104.228,00	90	41,25	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	43.500.000,00	8	dok	13.816.778,00	2	dok	5.558.787,00	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	0,00	-	dok	-	8		13.816.778,00	80	31,76			

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	10 dok	12.500.000,00	8 dok	3.485.394,00	2 dok	1.430.703,00	0 dok		2 dok	1.430.703,00	0 dok	-	0 dok		2 dok	1.430.703,00	10	4.916.097,00	100	39,33	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	10 dok	12.500.000,00	8 dok	3.485.394,00	2 dok	1.481.708,00	0 dok		2 dok	1.481.708,00	0 dok	-	0 dok		2 dok	1.481.708,00	10	4.967.102,00	100	39,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD	5 dok	36.000.000,00	4 dok	17.160.788,00	1 dok	2.243.463,00	0 dok		1 dok	2.243.463,00	0 dok	-	0 dok		1 dok	2.243.463,00	5	19.404.251,00	100	53,90	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	60 bulan	4.387.759.853,76	48 bulan	536.061.985,00	12 bulan	3.902.862.421,00	3 bulan	683.962.067,00	3 bulan	1.093.981.964,00	0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	1 bulan	1.777.944.031	49	2.314.006.016,00	82	52,74	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	3.500.000.000,00	48 bulan	-	12 bulan	3.476.284.787,00	3 bulan	586.237.322,00	3 bulan	966.984.800,00	0 bulan	-	0 bulan		6 bulan	1.583.222.122	54	1.583.222.122,00	90	45,23	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	60 bulan	875.759.853,76	48 bulan	532.300.000,00	12 bulan	421.884.640,00	3 bulan	97.724.745,00	3 bulan	96.997.164,00	0 bulan	-	0 bulan		6 bulan	194.721.909,00	54	727.021.909,00	90	83,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 lap	6.000.000,00	4 lap	1.880.992,50	1 lap	1.786.708,00	0 lap		0 lap	-	0 lap	-	0 lap		- lap	-	4	1.880.992,50	80	31,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	90 lap	6.000.000,00	72 lap	1.880.992,50	18 lap	2.906.286,00	0 lap		0 lap	-	0 lap	-	0 lap		- lap	-	72	1.880.992,50	80	31,35	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	60 bulan	1.055.000.000,00	48 bulan	361.518.847,00	12 bulan	83.819.256,00	3 bulan	0,00	3 bulan	4.031.400,00	0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	6 bulan	4.031.400,00	54	365.550.247,00	90	34,65	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	307 stel	210.000.000,00			52 helai	28.850.000,00	0 helai		0 helai	0,00	0 helai	0,00	0 helai	0,00	- helai	-	-	-	-	0,00	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian/JFP	3 lap	140.000.000,00	2 lap	59.084.668,00	1 lap	52.547.186,00	15 lap		0 lap	4.031.400,00	0 lap	0,00	0 lap	0,00	- lap	4.031.400,00	2	63.116.068,00	67	45,08	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai/JFP	3 lap	5.000.000,00	2 lap	2.446.669,00	1 lap	2.422.070,00	9 lap		0 lap	0,00	0 lap	0,00	0 lap	0,00	- lap	-	2	2.446.669,00	67	48,93	

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti diklat	60 bulan	700.000.000,00	48 bulan	299.987.510,00	12 bulan	-	3 bulan	0	3 bulan	0,00	0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	- bulan	-	48	299.987.510,00	80	42,86	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	60 bulan	2.885.898.491,32	48 bulan	2.172.364.368,00	12 bulan	258.923.420,00	3 bulan	24.685.037,00	3 bulan	49.217.099,00	0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	6 bulan	73.902.136,00	54	2.246.266.504,00	90	77,84	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	35.000.000,00	48 bulan	36.571.029,00	12 bulan	7.265.450,00	3 bulan	1.808.930,00	3 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	1.808.930,00	54	38.379.959,00	90	109,66	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	60 bulan	47.500.000,00	48 bulan	41.285.300,00	12 bulan	6.772.216,00	3 bulan	-	3 bulan	1.971.058,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	1.971.058,00	54	43.256.358,00	90	91,07	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	60 bulan	185.000.000,00	48 bulan	181.446.685,00	12 bulan	34.264.685,00	3 bulan	12.139.811,00	3 bulan	9.425.600,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	21.565.411,00	54	203.012.096,00	90	109,74	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	352.000.000,00	48 bulan	210.816.845,00	12 bulan	34.538.000,00	3 bulan	4.352.096,00	3 bulan	8.421.241,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	12.773.337,00	54	223.590.182,00	90	63,52	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buletin, majalah, surat kabar dan media lainnya	60 bulan	154.000.000,00	48 bulan	71.029.000,00	12 bulan	19.980.000,00	3 bulan	2.640.000,00	3 bulan	2.805.000,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	5.445.000,00	54	76.474.000,00	90	49,66	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	60 bulan	1.770.469.335,32	48 bulan	1.497.435.884,00	12 bulan	128.096.000,00	3 bulan	3.744.200,00	3 bulan	15.044.200,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	18.788.400,00	54	1.516.224.284,00	90	85,64	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Website Bappeda	60 bulan	341.929.156,00	48 bulan	133.779.625,00	12 bulan	28.007.069,00	3 bulan	-	3 bulan	11.550.000,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	11.550.000,00	54	145.329.625,00	90	42,50	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan barang milik daerah	60 bulan	1.552.500.000,00	48 bulan	1.142.700.000,00	12 bulan	15.100.000,00	3 bulan	0,00	3 bulan	0,00	-	-	-	0,00	3 bulan	-	51	1.142.700.000,00	85	73,60	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan	30 unit	750.000.000,00	22 unit	550.000.000,00	-	-	3 bulan	-	3 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	-	28	550.000.000,00	93	73,33	
		Pengadaan Mebel	Mebel	200 buah	500.000.000,00	166 buah	415.000.000,00	-	-	3 bulan	-	3 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	-	172	415.000.000,00	86	83,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin	5 paket	167.500.000,00	2 paket	54.690.000,00	12 bulan	15.100.000,00	3 bulan	-	3 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	-	8	54.690.000,00	160	32,65	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras gedung kantor	6 paket	135.000.000,00	2 paket	123.010.000,00	-	-	-	3 bulan	-	3 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	-	8	123.010.000,00	133	91,12	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bulan	1.734.300.404,46	48 bulan	1.108.613.812,20	12 bulan	213.282.800,00	3 bulan	45.403.913,00	3 bulan	52.857.644,00	0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	6 bulan	98.261.557,00	54	1.206.875.369,20	90	69,59		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	60 bulan	17.300.000,00	48 bulan	9.300.000,00	12 bulan	2.400.000,00	3 bulan	500.000,00	3 bulan	0,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	500.000,00	54	9.800.000,00	90	56,65		
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik	60 bulan	712.000.404,46	48 bulan	385.357.908,00	12 bulan	104.559.600,00	3 bulan	19.984.415,00	3 bulan	23.499.644,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	43.484.059,00	54	428.841.967,00	90	60,23		
		penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi kantor	60 bulan	1.005.000.000,00	48 bulan	713.955.904,20	12 bulan	106.323.200,00	3 bulan	24.919.498,00	3 bulan	29.358.000,00	0 bulan	-	0 bulan	0,00	6 bulan	54.277.498,00	54	768.233.402,20	90	76,44		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	60 bulan	1.220.000.000,00	48 bulan	792.134.055,00	12 bulan	135.374.000,00	3 bulan	7.932.000,00	3 bulan	54.862.800,00	0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	6 bulan	62.794.600,00	54	854.928.655,00	90	70,08		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan	60 bulan	860.000.000,00	48 bulan	657.052.555,00	12 bulan	115.704.000,00	3 bulan	7.932.000,00	3 bulan	51.162.600,00	0 bulan	-	0 bulan	-	6 bulan	59.094.600,00	54	716.147.155,00	90	83,27		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	60 bulan	130.000.000,00	48 bulan	57.135.000,00	12 bulan	7.180.000,00	3 bulan	-	3 bulan	1.700.000,00	0 bulan	-	0 bulan	-	6 bulan	1.700.000,00	54	58.835.000,00	90	45,26		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor	60 bulan	180.000.000,00	48 bulan	77.946.500,00	12 bulan	10.050.000,00	3 bulan	-	3 bulan	1.750.000,00	0 bulan	-	0 bulan	-	6 bulan	1.750.000,00	54	79.696.500,00	90	44,28		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras pendukung gedung kantor	60 bulan	50.000.000,00	48 bulan	-	12 bulan	2.440.000,00	3 bulan	-	3 bulan	250.000,00	0 bulan	-	0 bulan	-	6 bulan	250.000,00	54	250.000,00	90	0,50		
		Penataan Organisasi	Cakupan implementasi RB	2 dok	5.000.000,00	1 dok	2.154.485,00	1 dok	1.439.220,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	0 dok	0,00	- dok	-	1	2.154.485,00	50	43,09		

		Peningkatan Kinerja Reformasi dan Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi	2 dok	5.000.000,00	1 dok	2.154.485,00	1 dok	1.439.220,00	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	bulan	-	1	2.154.485,00	50	43,09	
3	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	6.633.940.882,00	71 %	3.508.072.304,00	29 %	1.055.763.377,00	7 %	90.157.042,00	7 %	78.129.183,00	0 %	0,00	0 %	0,00	14 %	168.286.225,00	85	3.676.358.529,00	85	55,42	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	100 %	3.465.000.000,00	71 %	2.209.261.453,00	29 %	834.563.797,00	7 %	83.124.642,00	7 %	66.537.094,00	0 %	0,00	0 %	0,00	14 %	149.661.736,00	85	2.398.923.189,00	85	68,08	PPE
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Laporan hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	2 lap	35.000.000,00	0 -	-	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	lap	-	-	-	-	0,00	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	2 lap	50.000.000,00	0 -	-	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	lap	-	-	-	-	0,00	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Forum Konsultasi Publik RKPD	5 kali	423.750.000,00	4 kali	339.000.000,00	1 kali	30.999.845,00	0 kali	11.816.107,00	0 kali	580.402,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	- kali	12.396.509,00	4	351.396.509,00	80	82,93	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RKPD	25 kali	423.750.000,00	20 kali	339.000.000,00	5 kali	35.956.649,00	0 kali	8.842.733,00	0 kali	2.113.916,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	- kali	10.956.649,00	20	349.956.649,00	80	82,59	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang RKPD Kabupaten	5 kali	423.750.000,00	4 kali	339.000.000,00	1 kali	133.577.420,00	0 kali	5.705.452,00	0 kali	25.252.839,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	- kali	30.958.291,00	4	369.958.291,00	80	87,31	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	95 kec	423.750.000,00	76 kec	339.000.000,00	19 kec	41.544.953,00	19	25.459.040,00	0 kec	2.260.913,00	0 kec	0,00	0 kec	-	19 kali	27.719.953,00	95	366.719.953,00	100	86,54	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD Kabupaten	10 dok	1.685.000.000,00	8 dok	853.261.453,00	2 dok	592.484.930,00	0 dok	31.301.310,00	0 dok	36.329.024,00	0 dok	0,00	0 dok	-	- dok	67.630.334,00	8	920.891.787,00	80	54,65	

		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIDP)	75 %	2.253.000.000,00	75 %	874.040.252,00	75 %	126.198.910,00	15 %	3.211.000,00	15 %	5.054.250,00	0 %	-	0 %	-	30 %	8.265.250,00	105	882.305.502,00	140	39,16	PPE
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan pelaksanaan aplikasi e-planning dan forum satu data	5 lap	655.000.000,00	4 lap	115.232.295,00	1 lap	94.999.994,00	0 lap	3.211.000,00	0 lap	5.054.250,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	8.265.250,00	4	123.497.545,00	80	18,85	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan hasil publikasi pembangunan daerah	5 lap	714.000.000,00	4 lap	269.995.736,00	1 lap	1.200.000,00	0 lap	-	0 lap	-	0 lap	-	0 lap	-	- lap	-	4	269.995.736,00	80	37,81	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku profil Kabupaten Sambas	300 buku	884.000.000,00	240 buku	488.812.221,00	60 buk u	29.999.916,00	0 buku	-	0 buku	-	0 buku	-	0 buku	-	- lap	-	240	488.812.221,00	80	55,30	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100 %	915.940.882,00	80 %	424.770.599,00	20 %	94.999.670,00	5 %	3.821.400,00	5 %	6.537.839,00	0 %	0,00	0 %	0,00	10 %	10.359.239,00	90	435.128.838,00	90	47,51	PPE
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	5 lap	533.940.882,00	4 lap	211.408.365,00	1 lap	24.999.775,00	0 lap	-	0 lap	1.088.052,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	1.088.052,00	4	212.496.417,00	80	39,80	
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Jumlah laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	5 lap	382.000.000,00	4 lap	213.362.234,00	1 lap	69.999.895,00	0 lap	3.821.400,00	0 lap	5.449.787,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	9.271.187,00	4	222.633.421,00	80	58,28	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100 %	10.388.705.694,00	80 %	5.230.056.887,00	80 %	1.410.199.870,00	20 %	162.321.026,00	20 %	235.544.947,00	0 %	0,00	0 %	0,00	40 %	397.865.973,00	120	6.627.922.860,00	120	63,80	

		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	4.957.395.225,00	80 %	2.809.370.491,00	80 %	461.297.282,00	20 %	47.546.100,00	20 %	69.229.232,00	0 %	0,00	0 %	0,00	40 %	116.775.332,00	120	2.928.145.823,00	120	59,03	PPM
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	5 lap	1.007.865.775,00	4 lap	841.919.969,00	1 lap	131.205.157,00	0 lap	22.536.362,00	0 lap	19.490.191,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	42.026.553,00	4	883.946.522,00	80	87,70	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 lap	0	0 lap	0	- -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 lap	0	0 lap	0	- -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	5 lap	400.000.000,00	4 lap	276.794.332,00	1 lap	104.052.376,00	0 lap	5.819.160,00	0 lap	8.811.296,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	14.630.456,00	4	291.424.788,00	80	72,86	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5 lap	2.050.722.793,00	4 lap	783.623.937,00	1 lap	115.828.635,00	0 lap	7.188.884,00	0 lap	22.372.317,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	29.561.201,00	4	813.185.138,00	80	39,65	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 lap	0	0 lap	0	- -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5 lap	1.498.806.657,00	4 lap	907.032.253,00	1 lap	110.211.114,00	0 lap	12.001.694,00	0 lap	18.555.428,00	0 lsp	-	0 lap	-	- lap	30.557.122,00	4	937.589.375,00	80	62,56	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100 %	2.143.000.000,00	100 %	291.364.393,00	100 %	294.972.452,00	25 %	30.072.936,00	25 %	61.031.069,00	0 %	0,00	0 %	0,00	50 %	91.104.005,00	150	382.468.398,00	150	64,51	PSIW
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 lap	886.000.000,00	4 lap	598.790.226,00	1 lap	29.972.686,00	0 lap	6.701.639,00	0 lap	7.508.000,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	14.209.639,00	4	612.999.865,00	80	69,19	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 lap	120.000.000,00	0 lap	0	1 lap	117.446.761,00	0 lap	10.497.485,00	0 lap	21.288.884,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	31.786.369,00	-	31.786.369,00	-	26,49	

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 lap	150.000.000,00	0 lap	0,00	1 lap	29.924.382,00	0 lap	2.072.000,00	0 lap	13.177.617,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	15.249.617,00	-	15.249.617,00	-	10,17	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 lap	987.000.000,00	4 lap	692.574.167,00	1 lap	117.628.623,00	0 lap	10.801.812,00	0 lap	19.056.568,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	29.858.380,00	4	722.432.547,00	80	73,19	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	3.288.310.469,00	100 %	2.129.322.003,00	100 %	653.930.136,00	25 %	84.701.990,00	25 %	105.284.646,00	0 %	0,00	0 %	0,00	50 %	189.986.636,00	150	2.319.308.639,00	150	70,53	PSIW
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5 lap	1.040.000.000,00	4 lap	757.492.046,00	1 lap	29.925.917,00	0 lap	1.113.000,00	0 lap	3.910.239,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	5.023.239,00	4	762.515.285,00	80	73,32	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	3 lap	1.000.000.000,00	2 lap	970.547.188,00	1 lap	150.000.000,00	0 lap	5.993.387,00	0 lap	8.470.222,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	14.463.589,00	2	985.010.777,00	67	98,50	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5 lap	773.310.469,00	4 lap	401.282.769,00	1 lap	102.037.848,00	0 lap	5.571.300,00	0 lap	13.423.859,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	18.995.159,00	4	420.277.928,00	80	54,35	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 lap	0	0 lap	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 lap	25.000.000,00	0 lap	0	1 lap	19.906.919,00	0 lap	2.375.925,00	0 lap	1.241.600,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	3.617.525,00	-	3.617.525,00	-	14,47	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 lap	450.000.000,00	0 lap	-	1 lap	352.059.452,00	0 lap	69.648.398,00	0 lap	78.238.726,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	147.887.124,00	-	147.887.124,00	-	32,86	
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbang	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang	100 %	3.645.508.485,82	100 %	2.944.908.375,00	100 %	548.535.429,00	25 %	7.904.451,00	25 %	30.701.731,00	0 %	0,00	0 %	0,00	50 %	38.606.182,00	150	2.983.514.557,00	150	81,84	LITBANG

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan	100 %	1.250.000.000,00	100 %	955.079.600,00	100 %	253.539.695,00	25 %	7.259.551,00	25 %	24.037.636,00	0 %	0,00	0 %	0,00	50 %	31.297.187,00	150	986.376.787,00	150	78,91	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan Laporan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	5 lap	1.250.000.000,00	4 lap	955.079.600,00	1 lap	253.539.695,00	0 lap	7.259.551,00	0 lap	24.037.636,00	0 lap	-	0 lap	-	- %	31.297.187,00	4	986.376.787,00	80	78,91	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	0,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	- %	-	100	-	100	0,00	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 dok	0,00	0 dok	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	- %	-	-	-	-	0,00	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	1.650.000.000,00	100 %	1.510.897.200,00	100 %	224.999.975,00	25 %	0,00	25 %	745.150,00	- %	0,00	- %	0,00	50 %	745.150,00	150	1.511.642.350,00	150	91,61	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi	5 dok	1.650.000.000,00	4 dok	1.510.897.200,00	1 dok	224.999.975,00	0 dok	-	0 dok	745.150,00	0 dok	-	0 dok	-	- %	745.150,00	4	1.511.642.350,00	80	91,61	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	745.508.485,82	100 %	478.931.575,00	100 %	69.995.759,00	25 %	644.900,00	25 %	5.918.945,00	0 %	-	0 %	-	50 %	6.563.845,00	150	485.495.420,00	150	65,12	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan hasil penelitian, pengembangan, dan perekrutannya di bidang teknologi dan inovasi	5 lap	745.508.485,82	4 lap	478.931.575,00	1 lap	19.999.816,00	0 lap	644.900,00	0 lap	5.918.945,00	0 lap	-	0 lap	-	- lap	6.563.845,00	4	485.495.420,00	80	65,12	

		Laporan hasil uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Laporan hasil uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 lap	-	0 lap	-	1 lap	29.996.175,00	0 lap		0 lap	-	0 lap	-	0 lap	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan hasil diseminasi	1 lap	-	0 lap	0	- -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan	1 lap	-	0 lap	-	1 lap	19.999.768,00	0 lap	-	0 lap	-	0 lap	-	0 lap	-	- lap	-	-	-	-	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		18,38	16,60					
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*);																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*);																								

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Terhadap APBD Tahun 2021

a. Kesesuaian Program Antara Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Bappeda dengan APBD Tahun 2021, terdapat kesesuaian 100% artinya bahwa jumlah program dalam Renja ada 5 program dan jumlah program yang ada dalam APBD ada 5 program.

b. Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Bappeda dengan APBD tahun 2021 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 18 kegiatan dan kegiatan yang ada di APBD sebanyak 18 kegiatan.

c. Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Seperti halnya evaluasi program, untuk sub kegiatan yang ada di Renja Bappeda dengan APBD tahun 2021 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah sub kegiatan yang ada di Renja sebanyak 56 kegiatan dan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 56 sub kegiatan.

d. Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021

Untuk anggaran yang ada di Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan kenaikan yang signifikan sebesar 24,69%. Anggaran yang diusulkan dalam Renja Bappeda Tahun 2021 sebesar Rp. 5.962.928.835,32, sedangkan dalam APBD pergeseran sebesar Rp.7.918.063.052,00 Kenaikan anggaran disebabkan adanya penambahan anggaran terkait belanja pegawai (gaji) ASN Bappeda Kabupaten Sambas.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappeda
Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan APBD 2021

No	Uraian	Renja 2021	APBD Pergeseran 2021
1	Program	15	15
2	Kegiatan	56	56
3	Pagu Anggaran	Rp.5.962.928.835,32	Rp. 7.918.063.052,00

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- Adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah terintegrasi dalam SIPD Kemendagri sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan selaras dengan penganggaran.
- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program dan kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sambas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi 2021	Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020		
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	80,00%	85,81%	86,16%	99,09%	100%	Belum terpenuhi dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran yang cukup signifikan antara RPJMD dan RKPD sehingga berdampak tidak semua program dapat dilaksanakan dan diakomodir
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	91,45%	100%	100%	100%	Terpenuhi
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	-	60%	70%	80%	90%	-	80%	100%	100%	90%	Melebihi dikarenakan jumlah Kelitbangan yang ditindak lanjuti telah sesuai dengan jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sambas, maka tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
- c. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan;
- d. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- e. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur Bappeda yang masih perlu ditingkatkan;
- f. Sarana dan prasarana organisasi yang belum optimal.

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- b. Meningkatkan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan;
- c. Mengurangi kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- e. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas SDM aparatur Bappeda;
- f. Teroptimalnya sarana dan prasarana Organisasi.

Untuk tercapainya tugas dan fungsi dari Bappeda Kabupaten Sambas yang dituangkan melalui program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan faktor eksternal melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi.

Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Oppurtunity*) dan Ancaman (*Threaths*). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Adanya Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
- 2) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan staf dalam pelaksanaan tugas
- 3) Tersedianya program kerja dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sambas.
- 4) Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sambas.

Kelemahan (*Weakness*) :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 2) Belum tersedianya data yang valid dan akurat
- 3) Keterbatasan anggaran
- 4) Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunity*):

- 1) Tersedianya akses informasi dan teknologi
- 2) Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya.

- 3) Adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Tantangan (*Threath*)

- 1) Inkonsistensi kebijakan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
- 2) Kondisi ekonomi yang fluktuatif
- 3) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
- 4) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Kabupaten Sambas serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Sambas. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021. Perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Renja perangkat daerah (*Proses Button-up dan Top-down*).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran yang diusulkan dalam Renja 2021 sebesar Rp.5.962.928.835,32 dengan realisasi sebelum pergeseran sebesar Rp.8.472.601.289,00 atau 70,38%. Kenaikan signifikan pagu anggaran dikarenakan adanya penambahan komponen gaji pegawai

dimana sebleumnya dalam Renja 2021 anggaran tersebut belum dimasukkan, namun anggaran tersebut dalam RKA 2021 ditambahkan, sehingga menambah pagu OPD secara keseluruhan. Kemudian setelah pergeseran berkurang menjadi Rp.7.918.063.052,00 dengan rincian belanja pegawai berkurang sebesar Rp. 504.520.000,00 dan belanja barang dan jasa berkurang sebesar Rp.50.018.237,00. Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Bappeda Kabupaten Sambas, diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program, maka evaluasi dan pengendalian harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan perubahan RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Sambas, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan termasuk besaran pagu anggaran yang bertambah/berkurang dari usulan awal. Pada saat proses penginputan program dan kegiatan terdapat program dan kegiatan baru yang tidak sesuai dengan RKPD, sehingga diperlukan penyesuaian rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renstra PD dan RPJMD.

Tabel 2.4 (T-C.31)
 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021
 BAPPEDA Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Sambas Lembar dari

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	439,549	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	442.048	
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan Keanekaragaman hayati	100%	439,549	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Persentase pengelolaan Keanekaragaman hayati	100%	442.048	
1.1.1	Pengelolaan Kebun Raya		Operasional, sarpras dan pengelolaan Kebun Raya Sambas	12 bulan	439.549	Pengelolaan Kebun Raya		Operasional, sarpras dan pengelolaan Kebun Raya Sambas	12 bulan	442.048	

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	5,133,509	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	4,715,682
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	10,714	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	12,655
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Renja SKPD Tersedianya Renstra	2 Dokumen	5,558	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Renja SKPD Tersedianya Renstra	2 Dokumen	7,500
2.1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1,430	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1,430
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1,481	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1,481
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen LAKIP	1 dokumen	2,243	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen LAKIP	1 dokumen	2,243
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	4,407,382	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3,910,000
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3,980,804	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3,480,000
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengelola keuangan perangkat daerah Sambas	12 bulan	421,884	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengelola keuangan perangkat daerah Sambas	12 bulan	425,000
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1,786	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2,000
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya laporan keuangan SKPD	18 Laporan	2,906	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya laporan keuangan SKPD	18 Laporan	3,000
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	83,819	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	113,000
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian khas daerah	1 Kegiatan	28,850	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian khas daerah	1 Kegiatan	55,000
2.3.2	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan hasil koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional perencana	1 Laporan	52,547	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan hasil koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional perencana Sambas	1 Laporan	55,000
2.3.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen PAK Jabatan Fungsional Perencana	2 Dokumen	2,422	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen PAK Jabatan Fungsional Perencana	2 Dokumen	3,000
2.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jenis diklat, kursus, sosialisasi dan bimtek	12 bulan	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jenis diklat, kursus, sosialisasi dan bimtek	12 bulan	0
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	263,352	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	275,280

2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sambas	12 bulan	7,265	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sambas	12 bulan	7,500
2.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Barang kebersihan kantor	12 bulan	6,772	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Barang kebersihan kantor	12 bulan	6,800
2.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor	12 bulan	34,264	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor	12 bulan	40,000
2.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	34,538	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	40,000
2.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar dan iklan	12 Bulan	19,980	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar dan iklan	12 Bulan	20,980
2.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan Luar Daerah	12 bulan	132,525	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan Luar Daerah	12 bulan	130,000
2.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terkelolanya aplikasi repository dan Website	12 bulan	28,007	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terkelolanya aplikasi repository dan Website	12 bulan	30,000
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pelayanan barang milik daerah	12 bulan	15,100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pelayanan barang milik daerah	12 bulan	20,000
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas/operasional	12 bulan	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas/operasional	12 bulan	0
2.5.2	Pengadaan Mebel		Meubelair Bappeda Kabupaten Sambas	12 bulan	0	Pengadaan Mebel		Meubelair Bappeda Kabupaten Sambas	12 bulan	0
2.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis alat studio	2 unit	15,100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis alat studio	2 unit	20,000
2.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Jenis peralatan gedung kantor	12 bulan	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Jenis peralatan gedung kantor	12 bulan	0
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	213,282	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	229,800
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang tersedia	240 lembar	2,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang tersedia	240 lembar	4,800
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bulan	104,559	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bulan	115,000
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga Honorarium	12 bulan	106,323	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga Honorarium	12 bulan	110,000
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	138,419	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	153,446
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Administrasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan 2 unit	118,749	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Administrasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan 2 unit	131,446
2.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Komputer dan alat elektronik yang dipelihara	12 bulan	7,180	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Komputer dan alat elektronik yang dipelihara	12 bulan	7,500
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung/kantor yang dipelihara	12 bulan	10,050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung/kantor yang dipelihara	12 bulan	11,500
2.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Gedung kantor dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan 4 unit	2,440	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Gedung kantor dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan 4 unit	3,000

2.8	Penataan Organisasi		Cakupan implementasi RB	12 bulan	1,439	Penataan Organisasi		Cakupan implementasi RB	12 bulan	1,500
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1,439	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1,500
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	1,075,800	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	1,104,999
3.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	100%	835,800	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	100%	850,000
3.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Terselenggaranya konsultasi publik RKPD dan RPJMD	12 bulan	30,999	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Terselenggaranya konsultasi publik RKPD dan RPJMD	12 bulan	35,000
3.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Terselenggaranya Forum SKPD/LintasSKPD Penyusunan RKPD dan RPJMD	12 bulan	35,956	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Terselenggaranya Forum SKPD/LintasSKPD PenyusunanRKPD dan RPJMD	12 bulan	40,000
3.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten Penyusunan RKPD dan RPJMD	12 bulan	133,577	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten Penyusunan RKPD dan RPJMD	12 bulan	135,000
3.1.3	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Tersedianya dokumen usulan musrenbang kecamatan dan hasil musrenbang kecamatan	2 dokumen	41,544	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Tersedianya dokumen usulan musrenbang kecamatan dan hasil musrenbang kecamatan	2 dokumen	45,000
3.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RKPD Tersedianya Dokumen RPJMD	2 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	593,721	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RKPD Tersedianya Dokumen RPJMD	2 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	595,000
3.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	75%	144,999	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	75%	149,999
3.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Terpeliharanya aplikasi e-planning Terselenggarany	12 bulan	94,999	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Terpeliharanya aplikasi e-planning Terselenggarany	12 bulan	104,999
3.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Terlaksananya publikasi pembangunan daerah	12 bulan	20,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Terlaksananya publikasi pembangunan daerah	12 bulan	10,000
3.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya buku profil Kabupaten Sambas	60 buku	29,999	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya buku profil Kabupaten Sambas	60 buku	35,000
3.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketepatan evaluasi dokumen	100%	94,999	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan		Persentase ketepatan evaluasi dokumen	100%	105,000
3.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 laporan	24,999	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi pengendalian dan evaluasi pembangunan	1 laporan	30,000
3.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan	4 dokumen 1 laporan	69,999	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan	4 dokumen 1 laporan	75,000

4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	1,425,205	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	100%	1,580,199
4.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	468,799	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	541,297
4.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	1 laporan	131,205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	1 laporan	151,205
4.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Dokumen informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan Laporan hasil fasilitasi, koordinasi sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	1 dokumen 1 laporan	104,052	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Dokumen informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan Laporan hasil fasilitasi, koordinasi sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	1 dokumen 1 laporan	124,052
4.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	2 laporan	115,828	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	2 laporan	135,828
4.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	4 laporan	117,713	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	4 laporan	130,211
4.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	299,974	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	334,972
4.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 laporan	29,972	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 laporan	39,972
4.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 laporan	119,947	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 laporan	127,446

4.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 laporan	29,924	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 laporan	39,924	
4.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 laporan	120,130	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 laporan	127,628	
4.3	Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	656,431	Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	703,930	
4.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 laporan	29,925	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 laporan	39,925	
4.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	150,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	160,000	
4.3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 laporan	104,539	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 laporan	112,037	
4.3.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	19,906	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	29,906	
4.3.5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 laporan	352,059	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4 laporan	362,059	
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	398,535	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	628,535	
5.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan	100%	253,539	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan	100%	273,539	

5.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan Laporan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	3 dokumen 1 laporan	253,539	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan Laporan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	3 dokumen 1 laporan	273,539
5.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	74,999	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	244,999
5.2.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi	1 dokumen	74,999	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi	1 dokumen	244,999
5.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi		69,995	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi		109,995
5.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Laporan hasil fasilitasi penelitian, pengembangan dan perekrayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 laporan	19,999	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Laporan hasil fasilitasi penelitian, pengembangan dan perekrayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 laporan	29,999
5.3.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode I Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Laporan hasil uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 laporan	29,996	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode I Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Laporan hasil uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 laporan	49,996
5.3.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		laporan hasil sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan	1 laporan	19,999	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		laporan hasil sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil kelitbangan	1 laporan	29,999

2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Bappeda sebagai perangkat daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bappeda dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

Tabel 2.5 (T-C.32)

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2021 Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Sambas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 ini memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 meliputi program dan kegiatan secara keseluruhan mengalami perubahan dikarenakan adanya *refocussing* dan penyesuaian anggaran.

Adapun rekapitulasi daftar perubahan rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Sumber Dana	Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur				Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												439,549,998	442,048,598			750,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	1	0		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												439,549,998	442,048,598			750,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	1	0	2.0	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												439,549,998	442,048,598			750,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5011206				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen LAKIP				1 dokumen	1 dokumen			2,243,463	2,243,463	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,440,000	
50112				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,407,382,421	3,910,000,000				3,955,346,000			
5011201				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 bulan	14 bulan			3,980,804,787	3,480,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,500,000,000
5011203				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengelola keuangan perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan			421,884,640	425,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000	
5011205				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			1,786,708	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,046,000
5011207				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersedianya laporan keuangan SKPD		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			18 laporan	18 laporan			2,906,286	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,300,000
50115				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									83,819,256	113,000,000				475,467,100			
5011502				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian khas daerah Tersedianya pakaian khas daerah		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan 50 stel	1 kegiatan 50 stel			28,850,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT Organisasi : 5.01.1.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	0	1	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan hasil koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional perencana Laporan hasil koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional perencana	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan			52,547,186	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			121,300,300			
5	0	1	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen PAK Jabatan Fungsional Perencana	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen			2,422,070	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,166,800			
5	0	1	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jenis diklat,kursus, sosialisasi dan bimtek			12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000				
5	0	1	0	2.0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah									263,352,420	275,280,000	638,812,219						
5	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 Bulan	12 Bulan			7,265,450	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,292,000				
5	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang kebersihan kantor			12 Bulan	12 Bulan			6,772,216	6,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,020,000				
5	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor			12 Bulan	12 Bulan			34,264,685	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,013,000				
5	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan			34,538,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			48,832,000				

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode										Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
											Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
															Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
															Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
5011066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar dan iklan					12 Bulan	12 Bulan			19,980,000	20,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23,123,000								
5011069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Makanan dan minuman rapat		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan 350 kotak	12 bulan 12 bulan 353 kotak			132,525,000	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					379,733,219								
5011061	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terkelolanya aplikasi repository Terkelolanya website		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan			28,007,069	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					117,799,000								
5011077	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											15,100,000	20,000,000				193,138,000										
5011072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44,000,000								
5011075	Pengadaan Mebel		Meubelair Bappeda Kabupaten Sambas					12 Bulan	12 Bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17,897,000								
5011076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis alat studio		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 unit	2 unit			15,100,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					61,347,000								
5011071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jenis peralatan gedung kantor Jenis perlengkapan gedung kantor		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69,894,000								
5011088	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											213,282,800	229,800,000				385,961,000										

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
50102001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			240 lembar	240 lembar			2,400,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000				
50102002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Air dan Listrik					12 Bulan	12 Bulan			104,559,600	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				122,871,000				
50102004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tenaga honorarium					12 Bulan	12 Bulan			106,323,200	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				257,090,000				
50102009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											138,419,000	153,446,422				217,251,000					
501020092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Administrasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 2 unit	12 bulan 3 unit			118,749,000	131,446,422	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				173,250,000				
501020096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Komputer dan alat elektronik yang dipelihara		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			7,180,000	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000				
501020099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung/kantor yang dipelihara					12 Bulan	12 Bulan			10,050,000	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,501,000				

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 501.13.050.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5010191	2.0.1.1			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung kantor yang dipelihara Peralatan gedung kantor yang dipelihara		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 4 unit	12 bulan 4 unit			2,440,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
50101	2.1.3			Penataan Organisasi										1,439,220	1,500,000				3,196,000		
50101	2.1.3			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Reformasi Birokrasi					1 dokumen	1 dokumen			1,439,220	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,196,000
50102				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										1,075,800,148	1,104,999,994				1,291,412,700		
50102	2.0.1			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										835,800,553	850,000,000				900,000,000		
50102	2.0.1.3			Pelaksanaan Konsultasi Publik		Terselenggaranya konsultasi publik RKPD dan RPJMD		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			30,999,845	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
50102	2.0.1.4			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Terselenggaranya Forum SKPD/Lintas SKPD Penyusunan RKPD dan RPJMD		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			35,956,649	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
50102	2.0.1.5			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten Penyusunan RKPD dan RPJMD		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			133,577,420	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
50102	2.0.1.6			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Tersedianya dokumen usulan musrenbang kecamatan dan hasil musrenbang kecamatan		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	2 Dokumen			41,544,953	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Tahun 2021																			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
50120207	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta		Jumlah dokumen RKPD Jumlah dokumen RPJMD Tersedianya Dokumen RPJMD		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen			593,721,686	595,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				615,000,000					
50120202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											144,999,925	149,999,994				261,412,700						
50120201	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Terpeliharanya aplikasi e- planning Terselenggaranya forum satu data		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan			94,999,994	104,999,994	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				123,530,000					
50120202	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Terlaksananya publikasi pembangunan daerah		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			20,000,015	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				72,882,700					
50120203	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta		Tersedianya buku profil Kabupaten Sambas		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 buku	60 buku			29,999,916	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				65,000,000					
50120203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											94,999,670	105,000,000				130,000,000						
50120201	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Ko ta		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			24,999,775	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45,000,000					
50120203	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Jumlah laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 dokumen 1 laporan	4 dokumen 1 laporan			69,999,895	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				85,000,000					

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5013	013	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										1,425,205,936	1,580,199,888				1,842,300,000	
5013	013	201			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										468,799,484	541,297,300				688,300,000	
5013	013	201	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan		131,205,157	151,205,157	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			155,000,000	
5013	013	201	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Dokumen informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan Laporan hasil fasilitasi,koordinasi sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan		104,052,376	124,052,376	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			145,200,000	
5013	013	201	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 laporan	2 laporan		115,828,635	135,828,635	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			145,000,000	
5013	013	201	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 laporan	4 laporan		117,713,316	130,211,114	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			243,100,000	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
501032	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										299,974,725	334,972,452					369,000,000					
50103201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			29,972,686	39,972,686	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000				
50103204	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			119,947,352	127,446,761	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				135,000,000				
50103205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			29,924,382	39,924,382	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,000,000				
50103208	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			120,130,305	127,628,623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				135,000,000				
501033	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										656,431,727	703,930,136					785,000,000					

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
Kode		Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum
5	013301	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			29,925,917	39,925,917	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,000,000	
5	013303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			150,000,000	160,000,000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			175,000,000	
5	013304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan hasil fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			104,539,439	112,037,848	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			120,000,000	
5	013307	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			19,906,919	29,906,919	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,000,000	
5	013308	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 laporan	4 laporan			352,059,452	362,059,452	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri			400,000,000	
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											398,535,429	628,535,429				748,546,800	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
50502		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										398,535,429	628,535,429			748,546,800		
505021	2.0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										253,539,695	273,539,695			373,546,800		
5050212	2.0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan Laporan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 dokumen 1 laporan	3 dokumen 1 laporan			253,539,695	273,539,695	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			373,546,800	
505023	2.0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										74,999,975	244,999,975			250,000,000		
5050231	2.0	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	2 Dokumen			74,999,975	244,999,975	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000	
505024	2.0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										69,995,759	109,995,759			125,000,000		
5050241	2.0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan hasil fasilitasi penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			19,999,816	29,999,816	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,000,000	
5050242	2.0	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan hasil uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			29,996,175	49,996,175	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,000,000	
5050244	2.0	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan hasil sosialisasi dan desiminasi hasil- hasil kelitbangan		Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			19,999,768	29,999,768	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,000,000	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						TOTAL										8,472,601,289		8,471,466,205		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas adalah program kegiatan dan sub kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Sambas yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta sasaran program Bappeda Kabupaten Sambas. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda serta sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Sambas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Sambas secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021.
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021, selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sambas, 2021

BUPATI SAMBAS,

SATONO